PIDANA PENJARA DAN HAK-HAK ANAK

Oleh :

Fransiska Novita Eleanora

Abstract :

Every man who is born into the world will always cling Human Rights (HAM), nor with a child. Who are the future generation, and must be protected their rights, prioritizing and promoting their rights, because every child is entitled to the right to live, grow and develop, as well as protection from violence and discrimination. The goal; to determine whether imprisonment in sanctioning the child is appropriately applied and provide protection for the rights of the child, Research Methods; Research Library. The result is the application of criminal sanctions against children, it gives a stigma to the child, and can interfere with mental and child psychology, so it does not promote the rights of children.

PENDAHULUAN

Sanksi adalah konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan, sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman, namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (straf) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana, baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana diluar KUHIP.

Khusus tentang sanksi pidana pada anak terdiri atas pidana dan tindakan (*maatregelen*), jenis sanksi pidana dalam hukum pidana anak di Indonesia masih

terbatas, baik jenis maupun variasi ancamannya. Namun hendaknya selalu mengedepankan dan mengutamakan akan hak-hak anak, kesejahteraan anak dan masa depannya dilindungi. (Sri Sutatiek, 2013; 1-2)

Karena hak-hak tersebut merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak-hak yang melekat pada manusia serta mencerminkan

martabatnya dan memperoleh jaminan hukum, hak-haknya dapat efektif apabila dilindungi oleh hukum, karena hak-hak tersebut merupakan pencerminan dari

HAM, tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak warganegaraanya. (Maidin Gultom, 2013; 7)

Anak yang melakukan tindak pidana seyogyanya disebut sebagai anak nakal, dan ada pertimbangan hakim sehingga cenderung memilih menjatuhkan sanksi pidana daripada sanksi tindakan kepada anak nakal. Pertimbangan tersebut bersifat yuridis dan nonyuridis, tetapi Hakim lebih cenderung pada pertimbangan yang bersifat yuridis, yakni sebagai implementasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pidana tersebut dimungkinkan dijatuhkan kepada anak nakal berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 dan KUHP atau Undang-Undang Pidana yang lain.

Hal ini dianggap karena tindak pidana yang dilakukan anak tersebut tergolong dalam kejahatan berat serta meresahkan masyarakat dan karena pelaku

adalah residivis. Sedangkan dalam dasar pertimbangan nonyuridis lebih difokuskan pada alasan sebagai upaya pembinaan, dan karena adanya keraguan atas efektivitas sanksi berupa tindakan (*maatregel*).

Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan umum, mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan kemasyarakatan. Peradilan Pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak, penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, petugas kemasyarakatan.

Oleh sebab itu, hak-hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), wajib untuk dijunjung tinggi dan diperhatikan, tanpa mengurangi sedikitpun juga, dan memperlakukan anak layaknya seperti manusia seutuhnya.

Karena anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam suatu system yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), bertujuan untuk

menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang perlu dikaji adalah : Apakah sanksi berupa pidana penjara yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana sudah tepat dan apakah penjatuan pidana penjara sudah megedepankan hak-hak anak ?

PEMBALIHAN

1. Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsiderans UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda

penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Apabila kita melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan diatas, maka dapat ditentukan berbagai macam batasan usia anak mengingat beragamnya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya : UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Usia Perkawinan 16 tahun bagi Perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak: Anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: Orang dalam perkara anak nakal telah berusia 8 tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Memperbolehkan usia bekerja 15 tahun.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, anak berusia 7-15 tahun. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Konvensi PBB tentang Hak Anak: Setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-Undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Hadi Supeno mengungkapkan bahwa semestinya setelah lahir UU Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak. (M. Nasir Djamil, 2013; 8-10)

2. Hak dan Kewajiban Anak

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia sejak dilahirkan ke dunia, begitupula dengan seorang anak, maka hak-haknya adalah :

a. Hak Terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan kehidupan dan untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Konsekuensinya menurut Konvensi Hak Anak negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Disamping itu, negara berkewajiban untuk menjamin hak atas tarap kesehatan tertinggi yang bisa dijangkau dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer.

b. Hak Terhadap Perlindungan
(*Protection Rights*)

Perlindungan anak dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak Perlindungan dari diskriminasi, termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan pelatihan khusus, serta hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan penduduk asli dalam kehidupan masyarakat negara.

c. Hak Untuk Tumbuh Berkembang
(*Development Rights*)

Segala bentuk Pendidikan (baik formal maupun nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 Konvensi Hak Anak yang menyebutkan bahwa :

- 1) Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma
- 2) Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan mudah dijangkau oleh setiap anak
- 3) Membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak
- 4) Mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah.

d. Hak Untuk Berpartisipasi
(*Participation Rights*)

Hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi hak anak. Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, penangkapan dan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan sebagai upaya terakhir. Anak yang dicabut kehebasannya pun harus memperoleh akses bantuan hukum dan hak

melawan keabsahan pencabutan kebebasan.
(Rika Saraswati, 2009; 21-24)

3. Kewajiban Anak

Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat "anak yang baik". Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada 5 (lima) hal Kewajiban Anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain : a) Menghormati orang tua, wali, dan guru, b) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, c) Mencintai tanah air, bangsa dan Negara, d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, e) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

4. Perlindungan Hak Anak

Dalam Konstitusi UUD 1945, disebutkan bahwa "*Fakir Miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*" kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam Pasal 28B ayat (2), bahwa "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*"

Perlindungan Hak Anak di Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dalam pembahasan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 diratifikasi melalui Keppres 36 Tahun 1996. Terkait dengan Anak yang bermasalah secara hukum, lahirlah UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dengan kelemahannya telah banyak mengundang perhatian Publik, sehingga Tahun 2012 lahirlah UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak yang diharapkan membawa perubahan terhadap Peradilan Anak.

Selain itu, pada Tahun 2002, disahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tidak langsung mengakomodir Prinsip-Prinsip Hak Anak Sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak. Dalam UU ini disebutkan ada 4 (empat) Prinsip Umum Perlindungan Anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain :

a. Prinsip Nondiskriminasi

Semua Hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak (KHA), harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest of The Child*)

Mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan

menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Bolch jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya yang terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*)

Negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh

kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.

d. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*)

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa. (M. Nasir Djamil, 2013; 27-31)

Perlindungan terhadap hak anak menjadi sangat penting, karena pelanggaran atas perlindungan hak anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, karena pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. (Rika Saraswati, 2009; 27)

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perspektif perlindungan hak anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.

5. Prinsip Perlindungan Anak

Hadi Supeno, mengatakan bahwa sejatinya anak membutuhkan pihak-pihak tertentu, baik orangtua/keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara selaku pembuat regulasi (*regulator body*), pelaksana pemenuhan hak-hak anak (*executive body*), dan pengemban kewajiban negara (*state obligation*).

Sementara itu, *Peter Newel*, dalam *Perlindungan Anak*, mengemukakan beberapa alasan subjektif dari sisi keberadaan anak, sehingga anak membutuhkan perlindungan, antara lain :

a. Biaya Pemulihan (*recovery*) akibat kegagalan dalam memberikan

- perlindungan anak sangat tinggi. Jauh lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan jika anak-anak memperoleh perlindungan
- b. Anak-anak sangat berpengaruh langsung dan berjangka panjang atas perbuatan (*action*) ataupun tidak adanya / dilakukannya perbuatan (*unaction*) dari pemetintah dan kelompok lainnya.
- c. Anak-anak selalu mengalami pemisahan atau kesenjangan dalam pemberian pelayanan public
- d. Anak-anak tidak mempunyai hak suara, dan tidak mempunyai kekuatan lobi untuk mempengaruhi agenda kebijakan pemerintah
- e. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat mengakses perlindungan dan penataan hak-hak anak
- f. Anak-anak lebih beresiko dalam eksploitasi dan penyalahgunaan
- Perlindungan terhadap anak dan hak anak sangat diperlukan karena banyak faktor yang menyebutkan anak beresiko mengalami kekerasan, pengabaian, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya, seperti :
- a. Cara Pengasuhan Menggunakan Kekerasan Yang Diterapkan Lintas Generasi
- Pengasuhan demikian biasanya masih menggunakan pendekatan militer atau pendekatan otoriter. Jenis pengasuhan ini memberikan pengalaman kepada anak tentang kekerasan.
- b. Kemiskinan Yang Berdampak Urbanisasi, Perubahan Gaya Hidup, Dan Perubahan Harapan Terhadap Kualitas Hidup
- Pemerintah yang tidak mampu member kesempatan kerja kepada orang tua akan berdampak anak-anak berhenti sekolah karena tidak ada biaya, dan membantu orang tuanya.
- c. Nila-Nilai masyarakat Yang Eksploitatif dan Diskriminatif
- Masih ada sebagian orang tua di masyarakat menganggap bahwa anak

adalah miliknya sehingga hak-hak anak cenderung diabaikan.

d. **Sistem Hukum Yang Tidak Mendukung Perlindungan Anak**

Perlindungan hukum bagi anak masih sangat jauh dari harapan. Tidak hanya peraturan bagi anak satu sama lain saling bertentangan, bahkan dipengaruhi pihak aparat penegak hukum yang masih masih belum berspektif hak anak dalam menghadapi dan menghadapi dan menyelesaikan persoalan anak. (Rika Saraswati, 2009; 27-28)

6. Pidana Penjara

Hukum dibuat untuk dijalankan dan dipatuhi sesuai dengan kegunaan dan fungsinya, agar masyarakat aman, tenteram dan tertib. Sehingga keberadaan hukum dalam masyarakat, tidak hanya diartikan sebagai sarana mengatur manusia dalam berhubungan atau berinteraksi agar menjadi tertib, akan tetapi juga dapat dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir

dan perilaku masyarakat yang bertujuan mewujudkan proses-proses berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.

Lambrosso mengatakan kejahatan sebagai perbuatan yang melanggar hukum alam tidak benar, sebab pengertian kejahatan selalu berbeda menurut tempat dan waktu. (I. S. Sutanto, 2011; 50)

Begitu pula halnya dengan seorang anak yang melakukan tindak pidana, dalam UU no. 3 Tahun 1997 dijelaskan bahwa ; anak nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Selama ini, jika terbukti ada seorang berusia 8-18 tahun, dikategorikan sebagai anak, dan diketahui bahwa anak tersebut melakukan kejahatan ataupun pelanggaran

hukum diberikan sanksi melalui pidana penjara ataupun sanksi tindakan, sesuai ketentuan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45-47 KUHP.

Pidana penjara dapat diartikan berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan kewajiban menaati semua peraturan atau tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan jika melanggar aturan tersebut.

Tujuan Pidana Penjara antara lain :

- a) Agar masyarakat itu menyadari hukum itu dipatuhi; b) Agar orang lain tidak terpengaruh akan sifat jahat dari pelaku; c) Agar pelaku tidak melarikan diri; d) Agar pelaku tidak merasa dimanjakan; e) Agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya; f) Agar pelaku mendapat pembinaan yang efektif dan efisien; g) Agar rasa keadilan korban atau keluarga korban terpenuhi / terjawab. (C. Djisman Samosir, 2012; 57-59)

Madhe Sadhi Astuti, dalam hasil penelitiannya menyebutkan "bahwa pidana penjara menimbulkan kerugian-kerugian terhadap terpidana, yakni" :

- (1) Ketidakmampuan narapidana untuk melanjutkan kehidupan secara produktif karena terlalu lama dalam lembaga
- (2) Terpidana cenderung melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah keluar dari penjara
- (3) Terpidana menjadi lebih ahli tentang kejahatan dan menjadi lebih jahat
- (4) Terpidana diberi "Julukan" oleh masyarakat
- (5) Masyarakat menolak kehadiran mantan narapidana
- (6) Peraturan Perundang-Undangan dan Pembukuan tentang kelakuan narapidana memainkan peranan dalam putusan-putusan sehubungan dengan lapangan pekerjaan maupun profesi,

pemberian izin, asuransi, kredit, untuk menempuh pendidikan, dll

- (7) Kombinasi dari stigma dan kehilangan kemerdekaan yang diberikan pemerintah terlihat terlihat sebagai tekanan ketat dan merendahkan martabat manusia. (Sri Sutatiek, 2013; 54-55)

Andaikan Pidana Penjara tidak ada, maka muncul berbagai Persoalan adalah :

- a) Bagaimana mengawasi pelaku yang bersangkutan
- b) Kemungkinan untuk melakukan kejahatan semakin besar, karena bebas bergerak di masyarakat
- c) Kesempatan melarikan diri sangat besar
- d) Ada kecenderungan masyarakat untuk melakukan tindak pidana, karena ada anggapan walaupun melakukan tindak pidana yang bersangkutan tidak akan dipenjara
- e) Pelaku kemungkinan besar akan mempengaruhi masyarakat yang lain untuk melakukan tindak pidana

- f) Masyarakat yang menjadi korban kejahatan akan merasa kecewa dan mungkin akan melakukan tindakan yang melanggar hukum karena rasa keadilan mereka tidak diperhatikan

Jika kita melihat tujuan pidana penjara diatas, sangat baik untuk diterapkan kepada mereka yang melakukan tindak pidana dalam kategori dewasa, lalu bagaimana dengan halnya seorang anak ? kenyataannya banyak anak yang melakukan tindak pidana dalam kapasitas pelaku dijatuhi pidana penjara, dengan tidak memperhatikan apa yang menjadi hak-hak dan nasib si-anak.

Dengan pemberian *label*, *cap* (*stigma*) kepada seorang anak tentunya dapat berpengaruh pada perkembangan dan kejiwaan anak tersebut. hakim dalam memutuskan hukuman kepada anak, harus melihat sebab-sebab mengapa si-anak melakukan kejahatan, dimana penyebab itu bisa saja berasal dalam diri si-anak ataupun diluar diri si-anak.

Penjatuhan pidana penjara yang dilakukan terhadap si anak seyogyanya boleh saja dilakukan, tetapi harus melihat dan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan memasukkan anak dalam LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) anak yang belum memadai, mendorong anak makin tertekan secara psikologis dan mental serta terisolasi dari lingkungan asalnya.

Kurangnya Pemahaman Penegak Hukum akan hak-hak anak, tidak adanya hakim anak di Indonesia juga menjadi salah satu faktor menyebabkan anak yang

melakukan tindak pidana harus diberikan sanksi pidana penjara. Walaupun pidana penjara mempunyai dampak yang kurang baik terhadap anak, tetapi penjatuhan pidana tersebut masih dianggap lebih baik.

Tindakan beraupa penyerahan kepada orang tua Anak nakal dianggap kurang efektif, karena ada anggapan bahwa kenakalan anak justru disebabkan oleh kegagalan orang tuanya mendidik anak sehingga dikhawatirkan anak akan mengulangi kenakalannya. (Sri Sutatiek, 2013; 41-45).

Berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang pengadilan Anak, Badan penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Mengungkapkan bahwa kenyataannya Pelaksanaan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memang benar-benar belum memadai, diantaranya disebabkan oleh belum dipahaminya substansi Undang-Undang tersebut secara memadai oleh Penegak Hukum.

Minimnya fasilitas yang tersedia untuk menangani perkara Anak Nakal, dan minimnya fasilitas pembinaan dan pelayanan anak di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan Anak), serta belum memadainya kemampuan dan sensitifitas petugas-petugas khusus yang menjalankan Undang-Undang tersebut, karena beberapa hal tersebut, peranan Hakim Anak tidak berjalan dengan baik.

Perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak, yang dalam kapasitas kejahatan berat, sangat merugikan orang lain, menimbulkan korban serta menghilangkan nyawa orang lain, sepatutnya harus dihukum. Artinya pidana penjara yang selama ini diberikan menurut hemat penulis tetap harus dipertahankan dan diberlakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, tetapi harus ada yang diperbaiki atau dilakukan pemulihan didalam lembaga pemasyarakatan anak.

Hak-hak anak harus diutamakan, pelayanan tentunya ada perbedaan dengan mereka yang dikategorikan dewasa, namun sampai saat ini banyaknya anak yang melakukan kejahatan dipidana dipersamakan hukumannya dengan orang dewasa, dimana penegak hukum menganggap dengan memberikan hukuman yang berat kepada anak, maka anak tersebut menjadi jera, dan tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Tidak adanya Hakim Anak yang mengadili anak yang melakukan tindak pidana, itupun dapat mempengaruhi dalam penjatuhan putusan, dimana hakim yang selama ini ada, hanya menganggap bahwa mengadili dan penjatuhan putusan terhadap terdakwa diberlakukan sama halnya dengan orang dewasa, begitupula didalam Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Jika Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan yang dikategorikan berat ataupun seriusu maka hukuman yang terbaik bagi anak adalah peradilan pidana bukan hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut tingkat keseriusan tindak pidananya. "Ganti Rugi yang dimaksud adalah sebuah sanksi yang diberikan oleh sistem peradilan pidana/pengadilan yang mengharuskan pelaku membayar sejumlah uang atau kerja, baik langsung maupun pengganti".⁴

Peradilan Pidana Anak, pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat,

anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat, si anak tersebut jera, tidak masyarakat normal dan bukan untuk trauma dan menjalani kehidupannya mengakhiri harapan dan potensi masa depannya.

Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik, dan sosial. Mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan, perlu diperhatikan dasar etis bagi pemidanaan tersebut, yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan.

Hak anak harus diperlakukan secara manusiawi, dan memperhatikan apa yang menjadi kepentingan yang terbaik bagi anak, mulai dari proses pemanggilan, lalu terdakwa, harus melihat kondisi dan kejiwaan si anak, dan begitu pula pada saat selesai menjalani masa hukuman, kembali ke

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pidana penjara yang diberikan kepada anak sesuai UU No. 3 Tahun 1997, harus dipahami oleh pihak-pihak yang berwenang, dengan melihat Perbuatan yang dilakukan oleh anak, sesuai dengan cara, proses dan penerapan pidana penjara tersebut.
2. Hak anak sesuai UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, harus diperhatikan, dengan pemberian pidana penjara, tetap harus diperlakukan dengan memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Saran

1. Harus ada koordinasi antara penegak hukum dan masyarakat jika mengetahui anak yang melakukan tindak pidana ataupun sebagai korban supaya hak-haknya dilindungi.

2. Sosialisasi Tentang UU yang menyangkut Perlindungan Anak, Hak-hak Anak, sehingga masyarakat dapat memahami apa yang menjadi hak-hak dari seorang anak dan bagaimana bentuk perlindungannya.

Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

C. Djisman Samosir, *Sekelumit tentang Penologi Dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012

I. S. Sutanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU no. 3 Tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*

UU No. 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

UU No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

UU No. 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*

UU No. 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

DAFTAR PUSTAKA

Sri Sutatick, *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia : Urgensi Penerbitan Panduan Pemidunaan (The Setencing Guidelines) untuk Hakim Anak*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan UU*

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29981/3/Chapter%20II.pdf>